

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	i
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Keaslian Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	37
A. Ruang Lingkup Hukum Pidana	37
1. Pengertian Hukum Pidana	37
2. Hukum Pidana Khusus	43
3. Pidana dan Pemidanaan	47
B. Tindak Pidana Korupsi	54
1. Pengertian Korupsi	54

2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi	56
3. Korupsi Politik.....	60
C. Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik.....	64
1. Pengaturan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik.....	64
2. Hak Politik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	69
BAB III METODE PENELITIAN	80
A. Jenis Penelitian	80
B. Sifat Penelitian.....	82
C. Bahan Penelitian	83
D. Lokasi Penelitian	86
E. Subjek Penelitian	87
F. Jalannya Penelitian	88
G. Analisis Data.....	91
H. Kendala Penelitian dan Cara Mengatasinya	91
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	93
A. Penerapan Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	93
1. Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan, KPK, dan Hakim	93
2. Analisis Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi	127
B. Penerapan Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi di Masa Mendatang.....	137
1. Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Masa Mendatang oleh Kejaksaan, KPK dan Hakim.....	137

2. Analisis Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Masa Mendatang	147
BAB V PENUTUP	150
A. Kesimpulan	150
B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA	155